



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

URGENSI 'IWAD DALAM KHULU' DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)**

**Oleh:
SLAMET
NIM. 58310100**



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2012 M/1433 H**



IKHTISAR

SLAMET : URGENSI 'IWAD DALAM KHULU' DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Dalam ajaran Islam perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal yakni: *talaq*, *khulu'*, *fasakh*, *li'an*, dan *ila'*. Dari bentuk-bentuk cara perceraian di atas, selain perceraian lewat *talaq* yang dilakukan suami, maka istri pun mempunyai hak untuk memutuskan hubungan suatu perkawinan yaitu dengan cara *khulu'*. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Dalam fikih Mazhab Syafi'i masalah *iwad* ini sering kita jumpai. Sementara dalam Hukum Islam di Indonesia masalah *iwad* tidak dibahas secara mendetail. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni: 1. Bagaimana definisi *khulu'* menurut pandangan *fiqh* mazhab Syafi'i?; 2. Bagaimana ketentuan dan urgensi *iwad* dalam *khulu'* menurut pandangan mazhab Syafi'i?; 3. Bagaimana relevansi *iwad* menurut mazhab Syafi'i dalam kontek hukum Islam Indonesia?

Adapun penelitian ini mempunyai tujuan: 1. Mengungkap data tentang definisi *khulu'* dalam Islam khususnya menurut mazhab Syafi'i, 2. Mendeskripsikan ketentuan dan urgensi *iwad* dalam *khulu'* menurut mazhab Syafi'i, 3. Mendeskripsikan akan relevan atau tidaknya *iwad* menurut mazhab Syafi'i terhadap hukum Islam di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan *normative deskriptif* sebagai upaya penyusunan bahan penelitian, dan metode *library research* (kepuustakaan) dipakai untuk teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan *khulu'* sebagai perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz *talaq* maupun dengan lafaz *khulu'*. Adapun dalilnya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dan hadits yang diriwayatkan Bukhari no. 5275 tentang *khulu'*, 2. Menurut mazhab Syafi'i jumlah atau kadar *iwad* boleh dibayarkan berupa maskawin atau sebagiannya atau dengan harta lain, sama, atau kurang, atau lebih dari maskawin. Jenis dan sifatnya sama seperti sesuatu yang dapat diperjual belikan, jika tidak maka *khulu'*-nya tertolak atau *iwad*-nya harus diganti dengan mahar *misil*. Dengan demikian, ketentuan atau kadar *iwad* berkedudukan sebagai batasan yang membolehkan ada dan tidaknya *khulu'*, maka keberadaan *iwad* dalam *khulu'* sama pentingnya dengan mahar dalam perkawinan, 3. penetapan kadar *iwad* baik menurut pendapat mazhab Syafi'i maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia sama-sama tidak membatasi jumlahnya, waktu pembayaran *iwad* boleh dilakukan kapan pun, sementara dalam masalah penetapan *iwad* sama-sama menggunakan asas musyawarah atau kesepakatan kedua belah pihak asalkan barang *iwad* memenuhi syarat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, hidayah serta inayahnya skripsi ini dapat tersusun dengan baik, amiin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.A, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Khaliq, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.
4. Bapak Dr. H. Samsudin, M. Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Rofi'i, MA, LLM, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Semua pihak yang telah memberikan motivasi begitu tinggi dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan serta ketulusan yang telah mereka berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritikan yang membangun pada penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amin. Dan terakhir penulis ucapkan terima kasih.

Cirebon, Mei 2012

SLAMET



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian yang Relevan	10
E. Kerangka pemikiran	10
F. Metodologi penelitian	14
G. Sistematika penulisan	16

BAB II : MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i	18
B. <i>Istinbat</i> Hukum Imam Syafi'i	20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

C. Pengertian Mazhab	21
D. Sejarah Mazhab Syafi'i	25
E. Sejarah Perkembangan Mazhab syafi'i di Indonesia	33
BAB III : PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG <i>KHULU'</i>	
A. Pengertian <i>Khulu'</i>	36
B. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	37
C. <i>Khulu'</i> dalam Perspektif Mazhab Syafi'i	39
D. <i>Khulu'</i> dalam Perspektif Hukum di Indonesia	43
BAB IV : URGENSI '<i>IWAḌ</i> DALAM <i>KHULU'</i> DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I	
A. Pengertian dan Dasar Hukum ' <i>IwaḌ</i>	46
B. Ketentuan dan Kedudukan ' <i>IwaḌ</i> Menurut Mazhab Syafi'i	50
C. Relevansi ' <i>IwaḌ</i> (Menurut Mazhab Syafi'i) dengan Hukum Islam di Indonesia	57
D. Analisis	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkataan ‘nikah’ menurut lughat berarti kumpul. Kalau diucapkan *Nakāhatil Asyḡāru*, artinya pepohonan itu menyatu dan saling melilit. Sedangkan menurut syara’ kata nikah berarti akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Terkadang digunakan juga dengan arti akad dan *wathi’* (bersetubuh), dalam *lughat*. Begitulah kata Az-Zajjaj. Sementara itu Al-Azhari berkata asal arti kata nikah dalam kalam Arab adalah *wathi’*. Kawin disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebab *wathi’*.¹

Perkawinan dalam terminologi para fuqaha Syafi’iyah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* (al Mahalliy, 2006).² Perkawinan juga disebut sebagai ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Selain itu perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *misaaqan galiḡa* yang tidak lepas dari unsur mentaati Allah dan melaksanakannya adalah

¹Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatu al Ahyar fii Hal Ghaayati al Ikhtishaar*, (Syarifudin Anwar dan Mishbah Musthafa, pent:), (Surabaya: Bina Iman,1993), h. 77.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed 1, cet ke-III, h. 37.



mengandung unsur ‘*ubudiyah*.³ Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I (Dasar Perkawinan) pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (UU RI no. 1 Tahun 1974 Bab II pasal 3).⁵ Namun demikian, kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis sesuai tujuan semula, riak-riak kecil sebagai tanda munculnya konflik setiap saat bisa muncul, jika tidak mampu dikendalikan dan dikelola dengan baik akan maka memicu terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian menurut Ahmad Rafiq (1995: 269-273), setidaknya ada empat kemungkinan untuk memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan, yaitu:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.
2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.
3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam Alquran disebut *syiqaq*.

³ Anik Farida, *et.al.*, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h.18.

⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), h. 5.

⁵ *Ibid.*, h. 180.



4. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan tuduh menuduh antara keduanya.⁶

Dalam ajaran Islam perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal yakni: (1) *Talaq*, (2) *Khulu'*, (3) *Fasakh*, (4) *Li'an*, dan (5) *Ila'*.⁷ Dari bentuk-bentuk cara perceraian di atas, selain perceraian lewat *talaq* yang dilakukan suami, maka istri pun punya hak untuk memutuskan hubungan suatu perkawinan yaitu dengan cara *khulu'*.

Khulu' (gugatan cerai) dari istri,⁸ berarti menanggalkan. Dari kata *khulu'* seperti ungkapan “ia menanggalkan baju”. Diartikan menanggalkan apabila ia menanggalkan baju itu. Dan *khulu'* menurut *syara'* ialah suatu pernyataan cerai dengan membayar ganti yang diambil suami.⁹

Dasar hukum dibolehkannya *khulu'* ialah ijma, Al-Qur'an dan sunnah juga ada yang membawanya. Allah SWT berfirman:

فلا جناح عليهما فيما افتدت به

“...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.(Al-Baqarah: 229).¹⁰

Dan juga hadits Nabi tentang *khulu'* yaitu:

⁶ Anik Farida, *et.al.*, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, op. cit., h.126.

⁷ *Ibid.*, h. 126.

⁸ Tim Peyusun Al Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006), cet. II, h.109.

⁹ Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatu al Ahyar fii Hal Ghaayati al Ikhtishar* (terj.), op. cit., h.166.

¹⁰ *Ibid.*, h. 166.



عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكثره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتردين عليه حديثه ؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa istri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya tidak menjelekkan Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus dalam perilaku menentang Islam (apabila saya tetap menjadi istri Tsabit bin Qais.) Rasulullah Saw. bersabda “Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Tsabit bin Qais (sebagai maskawin?” istri Tsabit bin Qais menjawab: “ya” Rasulullah Saw. bersabda kepada Tsabit bin Qais “terimalah kebun itu dan ceraikan istri kamu dengan talaq satu.” (HR Bukhari, no 5275)¹¹

Dengan demikian bila istri merasa khawatir bahwa suaminya tidak menunaikan kewajiban memberikan yang telah ditetapkan syari'ah dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan ikatan perkawinan mereka dengan memberikan 'iwaḍ (mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya) dan kalau mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi. Tetapi kalau istri gagal memberikan 'iwaḍ (pembayaran) ini, masih ada cara lain untuk memutuskan perkawinan itu melalui

¹¹Zainuddin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al- Bukhari*, (Achmad Zaidun, pent:), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 928-929.



“*Mubarat*” yang tak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah, semata-mata hanya dengan persetujuan kedua belah pihak.¹²

Iwad diambil dari kata عاض-عوضا-وعوضا yang secara bahasa mempunyai arti mengganti,¹³ yaitu mengganti atau mengembalikan sebagian atau seluruh harta kepada suaminya.¹⁴

Masalah *’iwad* atau tebusan bagi seorang istri apabila mengajukan cerai gugat (*khulu’*), hal ini masih perlu dikaji ulang. Berdasarkan hadits riwayat oleh Ibnu Abbas di atas bahwa istri Tsabit bin Qais meminta cerai dan mengajukan hal ini kepada Rasulullah, istri Tsabit mengajukan hal ini bukan karena dia mendapatkan tekanan, kekerasan dan penganiayaan dari suaminya tapi semata-mata karena “kekufuran” dan itu untuk keselamatan dan kebaikan suami itu sendiri. Hal ini memberikan pemahaman bahwa cerai gugat (*khulu’*) dapat dikenakan *’iwad* apabila semata-mata karena inisiatif si istri saja, tanpa mengalami kekerasan dan penganiayaan baik secara fisik maupun spikis. Tetapi kalau sebaliknya, dimana istri sudah ditinggalkan selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun tidak diberikan nafkah lahir dan batin, nafkah anak, serta istri mendapatkan penganiayaan

¹²Abdul Rahman, *Shari’ah The Islamic Law*, (Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, pent:), (Jakarta: PT Rineka Putra, 1996), cet II, h.114.

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet XVII, h.986.

¹⁴Abdul Rahman, *Shari’ah The Islamic Law* (terj.), op. cit., h. 114.



dan berbagai bentuk kekerasan lainnya,¹⁵ dengan tujuan agar seorang istri meminta *khulu'* dengan imbalan sejumlah uang, kemudian ternyata istri mau melakukannya, maka apakah *khulu'* yang seperti ini diperbolehkan dalam Islam serta bagaimana kedudukan *'iwadh* dalam *khulu'* tersebut, apakah istri harus tetap memberikan *'iwadh* baik jumlahnya sama, kurang atau bahkan lebih dari maskawin.

Sementara ditinjau dari letak keadilannya maka istri sebagai penggugat di samping membayar biaya perkara di Pengadilan juga ganti rugi yang disebut *'Iwadh*. Tentunya hal ini memicu sebuah pertanyaan juga yaitu seberapa pentingkah *'iwadh* dalam proses *khulu'* itu baik menurut hukum Islam di Indonesia atau pun menurut fiqih klasik ulama madzhab khususnya madzhab Syafi'i mengingat di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah pemeluk madzhab tersebut. Karena menurut pendapat sebagian orang keberadaan *'iwadh* dalam *khulu'* ini menjadi term yang tidak logis terutama apabila penyebab istri mengajukan gugatan cerai (*khulu'*) karena faktor suami yang melakukan kekerasan, menelantarkan, meninggalkan selama minimal 6 bulan atau bahkan lebih, tidak memberi nafkah, dan sebagainya.¹⁶ Hal senada dikatakan oleh Tri Wahyuni (Cimone Jaya, 23/5/04) dalam kasus yang sama bahwa masalah biaya untuk menebus diri (*'iwadh*) itu dianggap

¹⁵ Anik Farida, *et.al.*, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, op. cit., h. 32.

¹⁶ *Ibid.*, h.33.



sebagai sebuah masalah yang membuat lambat seseorang mengambil tindakan hukum, karena harus menyediakan biaya terlebih dahulu.¹⁷ Anggaphlah sebagai contoh, si istri adalah seorang wanita malang yang diperlakukan semena-mena dan diancam oleh suami yang kasar yang benar-benar menginginkan agar si istri mengembalikan seluruh maharnya.¹⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah '*Iwad*' ataupun kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya, jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Dan segolongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil '*iwad*' lebih banyak dari maskawin yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan lahir hadits Tsabit. Adapun mengenai sifat '*iwad*' (harta pengganti) tersebut para ulama juga berbeda pendapat, mengenai hal ini ada yang mensyaratkan diketahui sifat dan wujud harta tersebut dan ada juga ulama yang berpendapat membolehkan harta yang tidak diketahui wujud dan kadarnya serta harta yang belum ada, serta ada juga yang membolehkan harta atau barang yang tidak jelas.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, h.49.

¹⁸ Abdul Rahman, *Shari'ah The Islamic Law* (terj.), op. cit., h.114.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, pent:), (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet III, h.554-555.



B. Perumusan Masalah

Pada bagian ini penulis menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian yang dipilih adalah termasuk kedalam wilayah *Fiqh Munakahat*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

3. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian di sini adalah adanya ketidakjelasan tentang *'iwaḍ'* apakah harus sesuai dengan mahar atau tidak, dan ketidakpastian akan kedudukan *'iwaḍ'* apakah berpengaruh terhadap sah dan tidaknya *Khulu'*, sehingga hal ini akan dikaji melalui *fiqh* mazhab Syafi'i dengan melihat relevansinya terhadap *'iwaḍ'* yang berlaku pada hukum Islam di Indonesia sekarang.

b. Pembatasan Masalah



Agar dalam penelitian ini terfokus pada wilayah penelitian yang dikaji, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya pada ketentuan dan kedudukan *'iwaḍ* menurut mazhab Syafi'i serta relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

c. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana definisi *khulu'* menurut pandangan *fiqh* mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana ketentuan dan urgensi *'iwaḍ* dalam *khulu'* menurut pandangan mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana relevansi *iwaḍ* menurut mazhab Syafi'i dalam konteks hukum Islam Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap data tentang definisi *khulu'* dalam Islam khususnya menurut mazhab Syafi'i.
2. Mendeskripsikan ketentuan dan urgensi *'iwaḍ* dalam *khulu'* menurut mazhab Syafi'i.
3. Mendeskripsikan akan relevan atau tidaknya *'iwaḍ* menurut mazhab Syafi'i terhadap hukum Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:



1. Untuk menambah *keahlian* keilmuan dalam penulisan karya ilmiah yang semoga bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Untuk memenuhi syarat akademik mendapat gelar sarjana Syari'ah (S.Sy).

D. Penelitian yang Relevan

Yang dimaksud penelitian yang relevan atau ada yang menyebutnya penelitian terdahulu, adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan.

Dan setelah penulis melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan tidak ada penelitian yang mengangkat judul ini, yaitu “Urgensi *Iwaḍ* dalam *Khulu'* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i”. Hanya saja dalam penelitian terdahulu terdapat sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “*Pandangan Imam Syafi'i tentang Keabsahan Khulu' dalam Perceraian*” yang ditulis oleh Iis Yuliartuti (2005 M/1426 H), dalam karya ilmiah tersebut pembahasannya adalah mengenai bagaimana konsep *khulu'* dalam hukum perkawinan Islam dan bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang keabsahan *khulu'* dalam perceraian. Sehingga ini berbeda dengan



penelitian yang dilakukan penulis, dimana di sini pembahasannya lebih terfokus pada ketentuan *'iwad'* serta keurgensiannya dalam *khulu'*.

E. Kerangka Pemikiran

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau berada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya suami membenci istri atau istri membenci suaminya. Dalam keadaan ini islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian.

Firman Allah SWT :

وعاشروهن بالمعروف فانكرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

“Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan baik, jika kamu benci kepada mereka, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal justru di situ Allah jadikan banyak sekali kebbaikannya”.(an-Nisa :19)

Kebencian itu terkadang semakin membesar, percecokan semakin sangat, penyelesaiannya semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang lenyap ketenangan, cinta, kasih sayang, dan kemauan menunaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga sudah tidak ada lagi. Maka pada saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika kebencian itu adanya pada pihak suami,



ditanggannya terletak *talaq* yang merupakan salah satu haknya. Dia berhak menggunakannya selama masih sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian adanya dari pihak istri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.²⁰

Tentang ini Allah berfirman :

ولا يحل لكم ان تتخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به

*“Dan tidak halal bagi kalian (suami-suami), meminta kembali sedikitpun apa yang kalian telah berikan kepada mereka (istri-istri) kecuali bila keduanya (suami istri) khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah. Jika kalian khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah, maka tidak ada salahnya bagi mereka berdua (suami istri) tentang tebusan istri kepadanya.”*²¹

Tentang suami menerima *'iwaḍ* (tebusan) tersebut adalah hukum yang adil dan tepat. Karena tadinyalah suami yang memberikan mahar, membiayai biaya perkawinan, pelaminan dan memberi nafkah kepadanya. Tetapi tiba-tiba istri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah. Karenanya, itu adalah suatu keadilan, jika istri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu.²² Jadi, jika ada seorang wanita membebani suaminya karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau

²⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Moh. Thalib, pent:), (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), Jilid VIII, h. 93-94.

²¹*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj.), op. cit., h. 94.



karena yang lain, maka baginya diperbolehkan meng-*khulu'* dengan cara memberikan '*iwaḍ*' berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hal tersebut sesuai QS. Al-Baqarah: 229; maka tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan '*iwaḍ*' itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas '*iwaḍ*' yang diterimanya.²³

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal yang berkaitan langsung dengan *khulu'* adalah pasal 124 dan pasal 161 serta pasal 119 ayat 2b yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian dari talaq *ba'in sughra*. Adapun alasan yang dapat mendasari terjadinya *khulu'* sama dengan alasan talaq, yaitu mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h. Adapun berapa besarnya '*iwaḍ*' adalah berdasarkan kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak (pasal 148 ayat 4). Namun untuk menyelesaikan kasus *khulu'* KHI memberikan prosedur khusus melalui pasal 148.²⁴ Masalah '*iwaḍ*' ini juga disebutkan dalam Pembaharuan Hukum Islam (*Counter Legal Draft*) bagian ke enam tentang '*iwaḍ*' pasal 87 yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mut'ah* atau '*Iwaḍ*' wajib diberikan oleh suami istri jika perceraian mengakibatkan kerugian bagi pasangan.

²³Hasan Ayyub, *Fiqh Usrotul Muslimah*, (M. Abdul Ghofar, pent:), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), h. 305-306.

²⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) cet ke-I, h. 175-176.



- 2) Jumlah *Mut'ah* atau *iwaḍ* ditentukan oleh musyawarah kedua belah pihak atau keputusan pengadilan Agama atas pertimbangan kerugian pihak penerima *mut'ah* atau *iwaḍ*.²⁵

Demikianlah letak keadilan ajaran Islam diantaranya kesamaan derajat antara manusia, dalam hal perceraian pun ada keseimbangan antara hak seorang laki-laki yang ditanggannya ada *talaq*, begitu juga bagi seorang perempuan ada *khulu'* untuk dapat mengakhiri sebuah perkawinan apabila dirasa sudah tidak mungkin lagi bersatu. *Khulu'* merupakan bukti pula bahwa kesucian wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat. Dalam *khulu'* terdapat ketentuan *iwaḍ* (harta pengganti) yang merupakan konsekuensi yang harus dilakukan apabila seorang istri mengajukan cerai gugat.

F. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan (*library Research*), yaitu

²⁵Siti Musdah Mulia, *et.al.*, *Pembaruan Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, 2004), h.65.



mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data yang mengikat dan digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data yang relevan, adalah sebagai berikut:

- *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama.
- *Kifayat al-Ahyar fii hal hayah al-ikhtishar*, karya imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad al-Husaini.
- *Fath al-Mu'in* karya Zainudin al-Malibari
- *Al-Umm* karya Imam Syafi'i
- *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* karya Siradjuddin Abbas
- *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

2. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang memberi penjelasan terhadap data-data primer, diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Tafsir al-Maraghi*, karya Ahmad Mustofa al-Maraghi.
- *Fiqh Sunnah* karya Sayid Sabiq
- *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan lainnya.

c. Langkah-langkah Penelitian

Analisis data ini dilakukan dengan cara :



- Mencari data yang relevan dan kemudian menginventarisasi data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.
- Mengumpulkan data-data yang diperoleh sehingga akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian menganalisis data-data tersebut dengan tetap mengacu kerangka pemikiran yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua Mazhab Syafi'i yang membahas tentang gambaran umum tentang Mazhab Syafi'i diantaranya biografi Imam Syafi'i, *Istinbat* hukum Imam Syafi'i, definisi mazhab, sejarah mazhab syafi'i, perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.

Bab ketiga Pandangan Mazhab Syafi'i tentang *Khulu'* yang membahas tentang gambaran umum *khulu'* diantaranya tentang definisi *khulu'*, dasar hukum *khulu'*, syarat-syarat *khulu'*, serta praktek *khulu'* dalam hukum Islam di Indonesia.

Bab keempat adalah Urgensi '*iwaḍ*' dalam *khulu*' menurut perspektif Mazhab Syafi'i yang membahas tentang definisi '*iwaḍ*', dasar hukum '*iwaḍ*', urgensi dan kedudukan '*iwaḍ*', kadar, jenis, dan sifat '*iwaḍ*' (ketentuan '*iwaḍ*') menurut perspektif mazhab Syafi'i, serta relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

_____. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola. Tanpa Tahun.

Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Cet. XV. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru. 2007.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.

Abubakar, Taqiyuddin bin Muhammad al Husaini. *Kifayatu Al Ahyar fii Hayatu Ikhtishar*. (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, pent:). Surabaya: Bina Iman. 1993.

Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam* (Dani Hidayat, pent:). Tasik Malaya: Pustaka Al Hidayah, 2008.

Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari. *Fathul Mu'in* (K.H. Moch. Anwar, et. al., pent:). Bandung: PT Sinar Baru Alqensindo. 1994.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Syihabbuddin, pent:). Cet. I. Jakarta: Gema Insani. 1999.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Cet.I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2011.

As-Shiddiqie, Habsyi. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. 1971.

At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedi Islam Al Kamil*. Cet. XI. Jakarta: Darus sunah. 2011.

Ayyub, Hasan. *Fiqh Ussratul Muslimah*. (M. Abdul Ghafar, pent:). Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.

Az-Zabidi, Imam. *Muhktasar Shaheh al-Bukhary*. (Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, pent:). Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Farida, Anik, et. al. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2007.

Hakim, H. Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Setia. 2000.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1995.

http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=07210015

<http://www.pa-negara.go.id>

Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Mukhtashar Kitab Al Umm Fii Al Fiqh* (Imron Rosadi, pent:). Cet. V. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.

Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an (al-Fatihah- an-Nisa)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya. 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab* (Masykur A. B. *et. al.*, pent:). Cet. XXIII. Jakarta: Lentera. 2008.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita* (M. Abdul Ghoffar E. M. Pent:). Cet. XXIV. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Muhammad, Abu Bakar. *Subulussalam* (Alih bahasa: Abdurrasyi Nafis). Surabaya: Al Ikhlas. 1995.
- Mulia, Siti Musdah, *et. al.* *Pembaharuan Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. 2004.
- Rahman, Abdul. *Syari'ah The Islamic Law*. (Basri Iba Asghry dan Wali Masturi, pent:). Jakarta: PT Rineka Putra. 1996.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Cet. III. Bandung: PT. Sinar Baru Alqesindo. 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. (Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, pent:). Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- S. Lev, Daniel. *Islamic Courts in Indonesia*. (Zani Ahmad Noeh, pent:). Cet. I. Jakarta: PT. Intermedia. 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. (Moh. Thalib, pent:). Bandung: al-Ma'arif. 1993.

- Setyawan, Edy. *Perbandingan Madzhab (Ikhtiar Dinamisasi Pemahaman Fikih Modern)*. Cet. I. Cirebon: CV. Hikmah. 2010.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri', Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing. 2010.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*. Cet . I. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Tim Penyusun al - Manar. *Fiqh Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media. 2006.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2009.
- Warson, Munawir Ahmad. *Al -Munawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

